Lampiran 1

Templat Kebijakan Safeguarding untuk Federasi Anggota

Dokumen ini harus disusun dengan nasihat dan bimbingan dari organisasi setempat yang menangani perlindungan anak dan orang dewasa, serta organisasi lain, guna memastikan bahwa kebijakan ini memperhatikan budaya setempat dan dapat diterapkan di dalamnya. Ini merupakan cara terbaik untuk menyusun dokumen yang diadopsi oleh Federasi Anggota serta dipahami oleh para anggotanya dan masyarakat luas. Federasi Anggota perlu memutuskan apakah akan mewajibkan para anggotanya menyusun kebijakan dan prosedur mereka sendiri atau sangat menganjurkan mereka untuk melakukannya. Nama Federasi Anggota harus dicantumkan di antara tanda kurung siku [ ] di seluruh dokumen ini.

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Pernyataan Komitmen dan Prinsip Kebijakan
3. Definisi
4. Ruang Lingkup Kebijakan
5. Pelaporan Kekhawatiran
6. Diagram Alir Pelaporan
7. Kode Etik
8. Rekrutmen
9. Pelatihan dan Pendidikan
10. Prosedur Disipliner
11. Peninjauan
12. Pemantauan

1 Pendahuluan

[Federasi Anggota] bertanggung jawab untuk memajukan atletik di (Negara) dan menjadikannya lingkungan yang aman, tempat anak-anak dan orang dewasa dapat mengembangkan bakat dan mencapai tujuan mereka. Pengalaman ini harus menyenangkan dan menggembirakan. Kebijakan Safeguarding ini ("Kebijakan ini") menetapkan tanggung jawab [Federasi Anggota] dan [Klub] untuk memastikan bahwa anak-anak dan orang dewasa dapat berpartisipasi dalam atletik dengan aman.

Kepatuhan terhadap Kebijakan ini dan penerapan prinsip-prinsip praktik terbaik yang terkandung di dalamnya akan memungkinkan Federasi Anggota menyediakan dan menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan inspiratif bagi komunitasnya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam atletik.

Kekerasan dapat dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Kekerasan terjadi di seluruh belahan dunia dan di setiap cabang olahraga serta organisasi. Tidak ada wilayah yang dapat menganggap dirinya terbebas atau kebal dari dampaknya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi terjadi ketika terdapat ketimpangan kekuasaan antarindividu. Ketika seseorang berada pada posisi yang lebih kuat, ia dapat menyalahgunakan posisi tersebut, sehingga dapat terjadi kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi. Semakin rentan seseorang, baik karena usia, disabilitas, kondisi keuangan, maupun keadaannya, semakin besar kemungkinan ia menjadi korban kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi.

2 Pernyataan Komitmen dan Prinsip Kebijakan

[Federasi Anggota] meyakini bahwa setiap orang dalam atletik harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, serta berhak berpartisipasi tanpa menjadi korban kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi. [Federasi Anggota] akan melindungi semua orang yang termasuk dalam ruang lingkup Kebijakan ini dari perilaku tersebut. [Federasi Anggota] meyakini bahwa hak ini berlaku tanpa memandang asal-usul, warna kulit, usia, disabilitas, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, asal etnis, agama, atau keyakinan seseorang. [Federasi Anggota] berkomitmen untuk mencegah kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi terhadap orang-orang yang tercakup dalam Kebijakan ini, serta menciptakan lingkungan yang aman agar setiap orang dapat berolahraga dan menikmatinya sesuai kemampuannya. Kebijakan ini melindungi atlet, pelatih (termasuk seluruh personel pendukung atlet), ofisial, relawan, dan anggota dewan pengurus. Mereka semua harus memahami hak serta kewajiban mereka di bidang ini.

Prinsip-prinsip yang mendasari Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan bermartabat serta tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, asal-usul, usia, etnis, kemampuan, orientasi seksual, identitas gender, keyakinan, atau afiliasi agama maupun politik.
- Setiap orang berhak berpartisipasi dalam atletik, menikmatinya, dan berkembang secara pribadi melaluinya di lingkungan yang aman dan inklusif, bebas dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi.
- Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, berhak untuk didengar, terutama ketika menyampaikan kekhawatiran tentang kesejahteraannya sendiri atau orang lain. Setiap orang harus mengetahui kepada siapa harus meminta bantuan ketika memiliki kekhawatiran tentang perilaku seseorang.
- Setiap orang bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak-anak serta mengambil keputusan demi kepentingan terbaik mereka, karena kesejahteraan mereka adalah yang utama.

Untuk itu, [Federasi Anggota] akan:

- ✓ mengakui bahwa anggota dewan pengurusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan Kebijakan ini, serta menunjuk seorang “Duta Safeguarding” untuk menanamkan prinsip-prinsip Kebijakan ini dalam semua aspek programnya;
- ✓ menunjuk seorang staf atau relawan yang bertanggung jawab memimpin upaya safeguarding, yang disebut “Petugas Safeguarding”;
- ✓ memastikan semua orang mengetahui bahwa staf atau relawan yang ditunjuk tersebut adalah orang yang dapat dihubungi apabila mereka khawatir atau memiliki kekhawatiran tentang orang lain dan perilakunya;
- ✓ memastikan semua orang mengetahui hak-hak mereka dan prosedur yang akan diikuti apabila kekhawatiran disampaikan;
- ✓ menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur, termasuk kode etik, peraturan, dan prosedur disipliner, serta memperbaruinya sebagaimana diperlukan;
- ✓ memberikan dukungan dan arahan kepada siapa pun yang membutuhkannya setelah menyampaikan kekhawatiran atau mengajukan pengaduan maupun tuduhan;
- ✓ mengedukasi dan melatih seluruh staf dan relawan tentang cara menangani kekhawatiran dan pengaduan;
- ✓ menangani semua kekhawatiran, tuduhan, dan pengaduan secara adil, transparan, efektif, dan tepat waktu, serta memastikan pelapor diberi informasi secara berkala mengenai perkembangannya;
- ✓ melaksanakan semua penyelidikan dan pemeriksaan dengan cara yang menjamin tingkat independensi yang memadai, sehingga laporan atau penilaian risiko yang dihasilkan bebas dari bias;
- ✓ memperlakukan semua informasi yang berkaitan dengan kekhawatiran, pengaduan, atau tuduhan secara rahasia (sepanjang diizinkan oleh hukum) dan aman;
- ✓ menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, baik staf maupun relawan, melakukan pemeriksaan latar belakang dan memverifikasi referensi, serta memastikan hanya orang yang layak yang diangkat;
- ✓ bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan kelompok masyarakat yang memberikan dukungan dan arahan atas nama layanan sosial, guna memastikan keselamatan semua orang.

3 Definisi

Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi

Berikut ini diuraikan pengertian kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dan sering terjadi ketika salah satu pihak berada pada posisi berwenang yang memungkinkannya mengendalikan keadaan pihak lain. Ketika dalam suatu hubungan seseorang memiliki kewenangan atas orang lain, dapat timbul situasi yang membuat kekerasan lebih mudah terjadi. Individu yang berisiko harus dilindungi, dan mereka yang berada pada posisi berwenang harus memastikan bahwa langkah-

langkah perlindungan yang memadai telah diterapkan. Penting pula untuk dipahami bahwa pelatih, ofisial, atau relawan sendiri dapat menjadi korban kekerasan oleh orang lain.

Kekerasan psikologis adalah setiap tindakan yang tidak diinginkan, termasuk merendahkan, meremehkan, menolak, mengurung, mengisolasi, menyerang secara verbal, mempermalukan, mengintimidasi, atau memperlakukan seseorang seperti anak kecil, atau perilaku lain apa pun yang dapat mengurangi rasa jati diri, martabat, atau harga diri seseorang. Tindakan-tindakan ini merupakan inti dari sebagian besar bentuk kekerasan; di mana pun tindakan ini terjadi, kekerasan psikologis juga terjadi. Hal ini sering kali berbentuk perundungan secara langsung atau perundungan siber.

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang disengaja atau tidak diinginkan, seperti menendang, memukul, menggigit, atau membakar, yang menyebabkan cedera atau bahaya fisik. Hal ini dapat mencakup pemaksaan konsumsi alkohol atau praktik doping yang sistematis. Kekerasan fisik juga dapat berupa aktivitas fisik yang dipaksakan atau tidak sesuai, seperti latihan yang tidak sesuai dengan usia atau postur tubuh atlet. Latihan yang dipaksakan atau berlebihan dapat luput dari perhatian di lingkungan olahraga, karena ambisi atlet maupun pelatih, serta tekanan dari rekan sebaya, dapat mendorong atlet, pelatih, atau keduanya untuk membebankan atau menanggung beban latihan dan/atau komitmen pertandingan yang berlebihan. Dialog antara atlet dan pelatih untuk menetapkan target prestasi yang disepakati dan dapat dicapai dapat membantu menentukan tuntutan latihan yang dapat diterima dan sanggup dijalani. Pelatih bertugas meredam ambisi yang dapat bertentangan dengan kesehatan dan kesejahteraan atlet.

Kekerasan seksual adalah setiap perilaku bersifat seksual, baik melibatkan kontak fisik (dengan atau tanpa penetrasi) maupun tidak, yang dilakukan tanpa persetujuan, ketika persetujuan tidak dapat diberikan, atau ketika persetujuan diperoleh melalui paksaan atau manipulasi. Hal ini dapat mencakup melihat atau membuat gambar seksual, menyaksikan aktivitas seksual, mendorong orang lain untuk berperilaku tidak pantas secara seksual, atau melakukan bujuk rayu (grooming) terhadap seseorang sebagai persiapan untuk melakukan kekerasan.

Grooming (bujuk rayu) adalah suatu proses (daring maupun tatap muka) di mana seseorang membangun hubungan dengan seorang atlet dan mendorong atlet tersebut untuk memercayainya, sehingga ia dapat memanipulasi dan mengeksploitasi atlet tersebut demi keuntungannya sendiri. Grooming terhadap keluarga, staf pendukung, dan teman-teman atlet sering kali membuat mereka percaya bahwa pelaku dapat diandalkan dan dipercaya, sehingga pelaku memperoleh akses kepada atlet. Pelaku membuat atlet percaya bahwa ia harus menuruti tuntutan pelaku dengan cara memanipulasinya dan memanfaatkan hubungan di antara mereka. Kewenangan pelaku atas atlet digunakan untuk mengisolasi atlet dari teman dan anggota keluarga yang mungkin memperingatkannya agar tidak menuruti tuntutan tersebut.

Pelecehan adalah perilaku yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki yang menyinggung seseorang atau membuatnya merasa dipermalukan atau takut. Pelecehan berbasis kekuasaan terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan, biasanya di tempat kerja, menggunakan kewenangan tersebut untuk melecehkan orang lain yang berada pada posisi bawahan secara fisik maupun psikologis. Pelecehan berbasis kekuasaan dapat mencakup pengucilan dan pemberian tugas yang tidak pantas (terlalu sedikit, terlalu banyak, atau di bawah tingkat yang dapat diterima), serta perilaku yang mengganggu privasi.

Pelecehan seksual adalah setiap perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki, baik secara verbal, nonverbal, maupun fisik. Contoh pelecehan seksual verbal antara lain pertanyaan pribadi yang tidak diinginkan atau merendahkan tentang tubuh, pakaian, atau kehidupan pribadi seseorang, lelucon bernada seksual, serta ajakan atau tuntutan untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Hal ini dapat disampaikan melalui pesan teks, panggilan telepon, pesan tertulis, atau bentuk komunikasi tidak diinginkan lainnya yang bermuatan seksual. Contoh nonverbal dapat mencakup menatap dengan tidak pantas, gerakan isyarat, atau berbagi gambar bernuansa seksual. Contoh pelecehan seksual fisik antara lain kontak fisik bersifat seksual yang tidak perlu, seperti mencubit, mencoba mencium, menepuk, atau menyentuh.

Eksploitasi terjadi ketika seseorang mengendalikan orang lain dan/atau hartanya demi "keuntungan pribadi" tanpa persetujuan penuh berdasarkan informasi yang lengkap dari orang tersebut. Keuntungan pribadi dapat bersifat psikologis, reputasional, atau komersial, dan merupakan eksploitasi apabila hak-hak orang lain dijual atau dirundingkan tanpa persetujuannya yang tegas dan berdasarkan informasi yang lengkap. Contoh dalam atletik antara lain pemalsuan usia atau kewarganegaraan atlet secara curang, bertindak curang atas nama atlet, atau mengambil bagian yang tidak wajar dari pendapatan sponsor atau pengaturan pendanaan. Eksploitasi memiliki banyak bentuk, antara lain eksploitasi seksual, eksploitasi finansial, dan penandatanganan kontrak jangka panjang dengan atlet ketika mereka masih anak-anak.

Penelantaran adalah kegagalan memberikan standar minimum perawatan, baik fisik maupun emosional, yang menyebabkan bahaya, membiarkan bahaya terjadi, atau menimbulkan risiko bahaya yang mendesak. Hal ini biasanya berkaitan dengan perawatan yang diberikan orang tua atau pengasuh kepada anak-anak, tetapi juga berlaku bagi orang lain yang memiliki kewajiban untuk merawat orang lain, seperti kewajiban pelatih atau pemimpin tim terhadap atlet. Hal ini dapat mencakup tidak menyediakan air yang cukup pada suhu tinggi, pakaian yang sesuai pada suhu rendah, makanan yang layak, akomodasi, atau pengaturan perjalanan yang aman.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi dapat didasarkan pada asal-usul, agama, warna kulit, keyakinan, asal etnis, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, disabilitas, status sosial ekonomi, kemampuan olahraga, atau kombinasi dari karakteristik tersebut. Hal tersebut dapat berupa satu insiden tunggal yang berdiri sendiri atau serangkaian insiden, secara langsung maupun daring, dan dapat bersifat disengaja, tidak diminta, atau memaksa. Perundungan, penghinaan, dan penelantaran merupakan aspek lain dari pelecehan, kekerasan, atau eksploitasi dan harus ditangani dengan cara yang sama berdasarkan ketentuan Kebijakan ini.

Setiap bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi dapat mengandung unsur kekerasan finansial. Seseorang dapat dipaksa menandatangani kontrak atau perjanjian yang menguntungkan pihak lain secara finansial, tetapi belum tentu menguntungkan dirinya secara finansial. Setiap unsur paksaan dapat merupakan kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi apabila orang tersebut adalah anak, apabila ia tidak memberi kuasa kepada siapa pun untuk bertindak atas namanya, atau apabila ia tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari profesional independen, seperti akuntan atau pengacara, mengenai akibat dari ketentuan perjanjian tersebut.

Terkadang suatu tindakan mungkin tidak merupakan kekerasan bagi seseorang, tetapi dapat menjadi kekerasan atau merugikan karena kerentanan orang yang mengalaminya. Hal ini dapat disebabkan oleh usia, kemampuan, atau bentuk kerentanan lain orang tersebut.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi sering kali merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang berada pada posisi kepercayaan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang memiliki pengaruh, kekuatan, atau kewenangan terhadap orang lain. Hal ini sering terjadi ketika terdapat perbedaan usia, tetapi juga dapat terjadi di antara sesama sebaya, yaitu orang-orang yang usianya hampir sama. Kekerasan dapat terjadi di antara atlet, atau bahkan di antara pelatih, ofisial, atau orang lain mana pun yang terkait dengan atletik. Hal ini terkadang disebut kekerasan antarsebaya dan harus ditangani dengan cara yang sama seperti jenis kekhawatiran lainnya. Kekerasan juga dapat dilakukan oleh anggota keluarga, seperti orang tua, pasangan, dan saudara kandung.

Anak: istilah “anak” atau “anak-anak” mengacu pada individu atau sekelompok individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Safeguarding (perlindungan) adalah proses melindungi orang-orang yang berisiko, baik anak-anak maupun orang dewasa, dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Menciptakan lingkungan yang aman dan ramah, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, merupakan inti dari safeguarding. Setiap orang yang terlibat dalam atletik memiliki peran untuk secara aktif memastikan bahwa kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi dicegah, bahwa cerita anak-anak dan orang dewasa tentang pengalaman mereka didengarkan, dan bahwa apabila terjadi masalah, diberikan tanggapan yang aman dan menyeluruh.

4 Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi [Federasi Anggota] beserta atlet, ofisial, staf, dan orang lain mana pun yang terkait dengan [Federasi Anggota]. Hal ini mencakup ofisial, relawan, anggota tim pendukung atlet, orang tua, pengasuh, dan setiap orang yang terkait dengan atletik di [negara tempat Federasi Anggota berada]. Semua orang yang tercakup dalam Kebijakan ini wajib mematuhinya. Setiap pelanggaran terhadap Kebijakan ini oleh orang-orang tersebut dapat dikenai tindakan disipliner.

5 Pelaporan Kekhawatiran

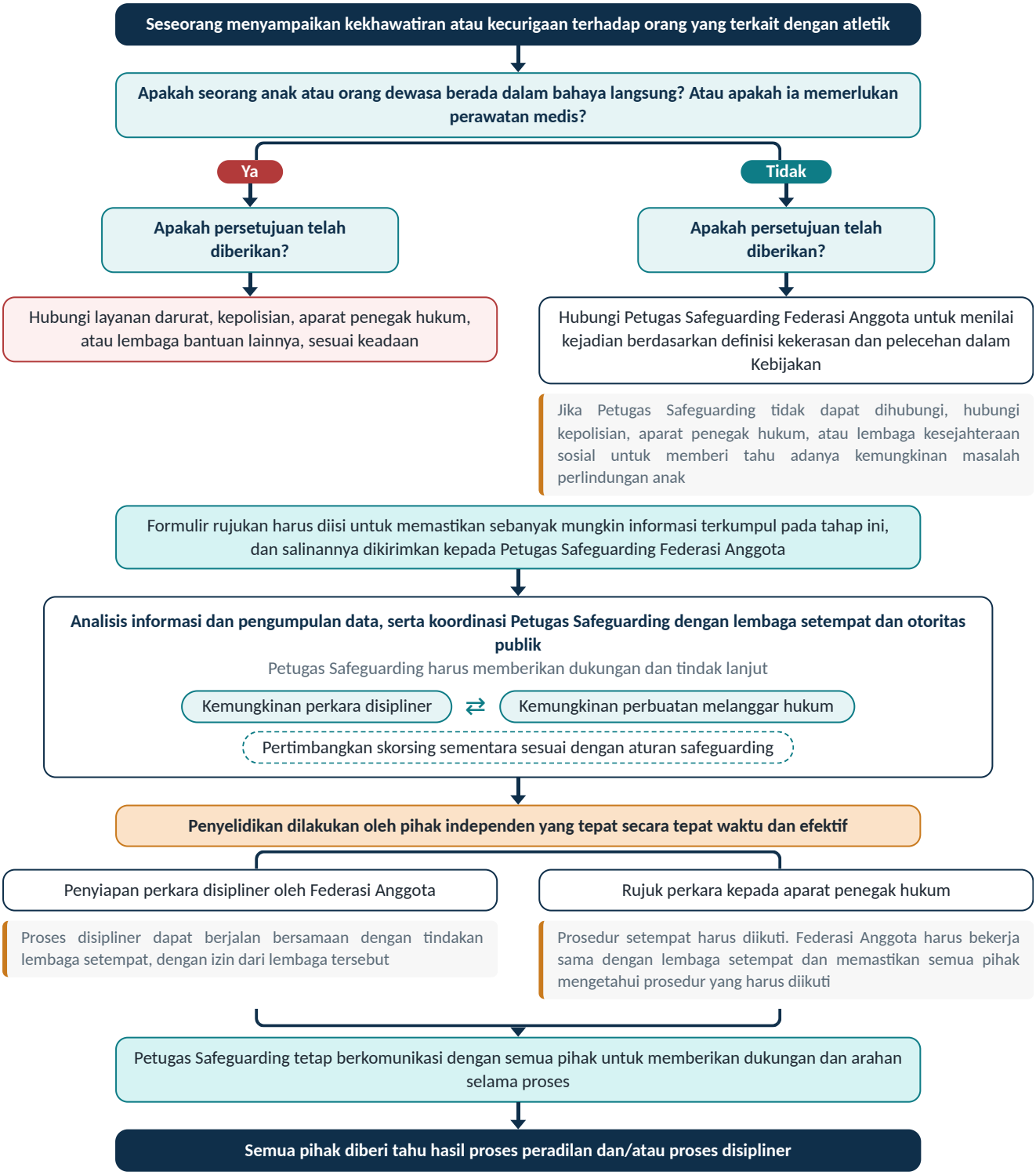
Setiap orang bertanggung jawab memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi. Oleh karena itu, apabila seseorang mencurigai bahwa seorang anak atau orang dewasa mengalami kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi dalam bentuk apa pun, atau memiliki kekhawatiran tentang perilaku orang lain, kekhawatiran tersebut harus dilaporkan kepada Petugas Safeguarding [Federasi Anggota] agar perkara tersebut dapat dinilai dan ditangani dengan tepat. Keterlibatan kepolisian atau layanan sosial juga mungkin diperlukan; Petugas Safeguarding [Federasi Anggota] akan melakukannya dan mengoordinasikan tindakan yang diperlukan.

Apabila seseorang berada dalam bahaya langsung mengalami cedera serius, perkara tersebut harus segera dilaporkan kepada layanan darurat tanpa penundaan. Dalam keadaan tertentu, persetujuan orang yang bersangkutan harus diperoleh sebelum suatu perkara dilaporkan, dengan memperhatikan usia dan kapasitas mentalnya. Kapasitas untuk memberikan persetujuan berbeda antara anak berusia di bawah 12 tahun dan anak berusia antara 12 dan 18 tahun, serta antara anak dan orang dewasa. Apabila orang tersebut menolak memberikan persetujuan, kewajiban untuk melaporkan perkara tersebut mungkin tetap ada. [Hal ini dapat merupakan bidang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau prosedur setempat dan harus dimasukkan dalam Kebijakan ini].

Kekhawatiran, tuduhan, dan perkara lain yang dilaporkan kepada [Federasi Anggota] harus diselidiki oleh orang yang sama sekali tidak terkait dengan perkara tersebut. Penyelidik tidak harus sepenuhnya independen dari [Federasi Anggota] apabila perkara tersebut berkaitan dengan “kekhawatiran tingkat rendah”. Semakin serius kekhawatiran atau tuduhan, semakin penting bagi orang yang menyelidikinya untuk independen dari [Federasi Anggota]. Apabila kekhawatiran dirujuk kepada kepolisian, kepolisian akan melakukan penyelidikan. Setiap penyelidikan oleh [Federasi Anggota] atas kekhawatiran serius harus dilakukan oleh orang yang tidak terkait dengan [Federasi Anggota] dan yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, guna memastikan bahwa penyelidikan dilakukan tanpa bias, secara kompeten, dan secepat mungkin.

6 Diagram Alir Pelaporan

[Ini adalah diagram alir umum yang perlu disesuaikan dengan memperhatikan prosedur setempat.]



7 Kode Etik

Federasi Anggota harus memiliki kode etik bagi staf, eksekutif, dan orang lain mana pun yang terlibat dalam pengelolaan organisasi. Federasi Anggota juga harus memperhatikan kelompok lain, seperti pelatih, atlet, staf pendukung medis, ofisial, dan koordinator acara. Kode etik ini dapat bersifat khusus atau umum sesuai kebutuhan, dengan syarat bahwa kelompok-kelompok tersebut mengetahui kode etik tersebut dan diwajibkan untuk menegaskan komitmen mereka terhadapnya.

[Federasi Anggota] memiliki kode etik sebagai berikut:

- Kode etik untuk pelatih
- Kode etik untuk atlet
- [Kode etik lain yang telah diputuskan untuk disusun oleh [Federasi Anggota]]

Semua kode etik di atas berpusat pada perlakuan terhadap orang lain dengan hormat, setara, adil, dan bermartabat, serta didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berharga dan layak dihormati. Kode etik ini dirancang untuk memberi tahu setiap orang yang terkait dengan atletik tentang perilaku yang diharapkan [Federasi Anggota] dari mereka. Aturan ini harus menjadi bagian dari setiap program pelatihan bagi kelompok-kelompok tersebut, untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui keberadaan aturan ini, harapan [Federasi Anggota], dan kemungkinan dikenakannya tindakan disipliner apabila tidak dipatuhi. Kode etik ini disusun setelah berkonsultasi dengan kelompok-kelompok terkait dan akan ditinjau secara berkala.

Kode etik akan disediakan bagi kelompok-kelompok terkait dan ditampilkan di papan pengumuman atau situs web, atau dimuat dalam dokumen tertulis apa pun, seperti formulir perpanjangan keanggotaan.

Apabila seseorang mengetahui bahwa orang lain melanggar kode etik yang berlaku, hal tersebut harus dirujuk kepada Petugas Safeguarding sebagai kekhawatiran untuk diselidiki dan kemungkinan dikenai tindakan disipliner. Pelanggaran terhadap kode etik mana pun dapat ditangani berdasarkan prosedur disipliner apabila [Federasi Anggota] tidak menerapkan aturan safeguarding khusus.

8 Rekrutmen

Semua pelamar, baik sebagai staf maupun relawan, untuk peran apa pun yang mengharuskan bekerja secara dekat dengan anak-anak, wajib menjalani pemeriksaan latar belakang atau pemeriksaan catatan kriminal. Semua pelamar wajib mengikuti wawancara dan memberikan dua referensi, serta akan mengikuti sesi orientasi setelah diangkat. Wawancara akan mencakup pertanyaan tentang pelamar dan pengalamannya, serta pengetahuannya tentang safeguarding. Referensi akan diverifikasi; salah satunya harus berasal dari pemberi kerja saat ini atau sebelumnya, dan yang lain dari orang yang mengetahui pekerjaan pelamar dengan anak-anak atau di bidang olahraga. Sesi orientasi akan memastikan bahwa pelamar yang terpilih memahami peran dan tanggung jawabnya serta memperoleh informasi tentang kebijakan dan prosedur safeguarding.

9 Pelatihan dan Pendidikan

Seluruh staf, relawan, dan ofisial [Federasi Anggota] akan menerima pelatihan safeguarding yang sesuai dengan peran mereka dalam organisasi. Mereka yang bekerja dengan anak-anak akan menerima pelatihan khusus yang secara spesifik berkaitan dengan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan mereka.

Pelatihan safeguarding harus dilaksanakan secara berkala [paling sedikit setiap tahun atau setiap dua tahun].

10 Prosedur Disipliner

Pelanggaran terhadap Kebijakan ini dan aturan safeguarding [Federasi Anggota] akan ditangani berdasarkan prosedur disipliner [Federasi Anggota], yang harus dirujuk untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

11 Peninjauan Kebijakan Ini

Kebijakan ini akan ditinjau setiap tahun.

12 Pemantauan

Kebijakan ini dan pelaksanaannya akan dipantau secara berkala, sebagaimana mestinya, oleh [Federasi Anggota] atau oleh otoritas safeguarding independen yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ini.